

Evaluasi Efektivitas Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) Dalam Melaksanakan Audit Internal

Ryke Octava Prativi
Universitas Negeri Surabaya
er_octava@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the implementation, effectiveness and efficiency of the Internal Supervisory Unit of the PT. XYZ in conducting internal audit in the company. The study was conducted using qualitative methods and two types of research data, the primary data and secondary data obtained in natural conditions (natural setting). Primary data is collected by interviewing deeply the interviewees, that was implementation and documentation team of ISO 2008 : 9001 (in depth interview). Secondary data obtained through literature sources such as the Report of Inspection and Quality Management System ISO 2008 : 9001. To sharpen the study result, research object taken and observed is about the performance of the Internal Supervisory Unit in overseeing the implementation of operational activities based on ISO 2008 : 9001 in Government Marketing Unit Project. The results showed an understanding of the procedure has not been fully implemented Quality Management, as well as on contracts that have not been conducted according to standards in terms of quality procedures of ISO 2008 : 9001 which is contain of procedure related with customer.

Keyword: Unit Supervisor Intern, Organization for Standardization (ISO)

PENDAHULUAN

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan manufaktur telah berstandar *International Organization for Standardization (ISO)*. *International Organization for Standardization (ISO)* menjadi prosedur mutu yang mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu. Bukti PT. XYZ telah berstandar ISO adalah dengan adanya sertifikat elemen ISO 9001 dan prosedur mutu ISO tentang Satuan Pengawas Intern. Satuan Pengawas Intern (SPI) dibutuhkan supaya ISO berjalan sesuai dengan prosedur mutu. Satuan Pengawas Intern berperan dalam memastikan terlaksanakannya pengelolaan perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan standar pada ISO. Dengan adanya prosedur mutu ISO diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui penyediaan jaminan mutu yang lebih baik. Satuan Pengawas Intern memberikan penilaian yang disajikan dalam bentuk laporan hasil audit sesuai prosedur mutu ISO.

Namun terdapat penyimpangan yang terjadi pada implementasi prosedur mutu. Pada unit yang diteliti yaitu Unit Proyek Pemerintah ditemukan pemahaman terhadap Prosedur Mutu belum sepenuhnya dilaksanakan seperti pada kontrak yang belum dilakukan sesuai standar di ketentuan prosedur mutu ISO yang mengatur tentang proses yang terkait dengan pelanggan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya keputusan di Tinjauan Kontrak yang secara lingkup di luar kewenangan forum tinjauan kontrak (belum diatur sistem), legalitas tinjauan kontrak sebagai dasar penerbitan Nota Dinas belum didukung dengan landasan sisdur atau kebijakan tertulis serta lima notulen tinjauan kontrak yang dibuat pemasaran belum sesuai prosedur.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Bagaimana Satuan Pengawas Intern pada PT. XYZ melaksanakan audit internal dalam perusahaan? Apakah Satuan Pengawas Intern PT. XYZ telah menjalankan fungsi secara efektif dan efisien di dalam melaksanakan audit internal? Oleh karena itu penulis membahas tentang Evaluasi Efektivitas Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam Melaksanakan Audit Internal.

KAJIAN PUSTAKA

Standar Mutu *International Organization for Standardization* (ISO)

International Organization for Standardization (ISO) 9000 membahas berbagai aspek manajemen mutu dan berisi beberapa standar ISO. Standar mutu memberikan pedoman dan alat untuk perusahaan dan organisasi yang ingin memastikan bahwa produk dan layanan mereka secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan, dan kualitas yang secara konsisten ditingkatkan. Ada banyak standar dalam ISO 9000. ISO 9001 : 2008 menetapkan persyaratan sistem manajemen mutu. ISO 9000 : 2005 mencakup konsep-konsep dasar dan bahasa. ISO 9004 : 2009 berfokus pada bagaimana membuat sistem manajemen mutu yang lebih efisien dan efektif, ISO 19011 menetapkan pedoman audit

internal dan eksternal dari sistem mutu. ISO 9001 : 2008 menetapkan kriteria untuk sistem manajemen kualitas dan merupakan standar yang dapat disertifikasi (meskipun hal ini bukan keharusan). Hal ini dapat digunakan oleh setiap organisasi, besar atau kecil, terlepas dari bidang usahanya.

Penerapan ISO 9001:2008

Pada penelitian kali ini standar mutu yang digunakan adalah ISO 9001:2008. Standar mutu ISO 9001:2008 merupakan Sistem Manajemen Mutu yaitu: Sistem Manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu. Penerapan ISO 9001:2008 akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektifitas operasional. Standar ini didasarkan pada sejumlah prinsip manajemen mutu termasuk fokus pelanggan yang kuat, motivasi dan implikasi manajemen puncak, pendekatan proses dan perbaikan berkesinambungan. Prinsip Manajemen Mutu menggunakan ISO 9001:2008 membantu memastikan bahwa pelanggan mendapatkan konsisten, produk berkualitas baik dan jasa, yang pada gilirannya memberikan manfaat bisnis. Pada saat audit memeriksa bahwa sistem bekerja dengan baik menjadi bagian penting dari ISO 9001:2008. Organisasi harus melakukan audit internal untuk memeriksa bagaimana kualitas sistem manajemen bekerja. Dengan penerapan ISO diharapkan bahwa produk yang dihasilkan dari suatu sistem manajemen kualitas internasional, akan berkualitas baik (standar).

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Tugas auditor internal dalam perusahaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha dan juga pengendalian internal, seperti yang dinyatakan oleh (Mulyadi,2002:29): “Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan

efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Tujuan dari audit internal menurut (Hiro Tugiman, 1997:99) adalah: “Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar”. Dengan kata lain tujuan audit internal memberi pelayanan kepada organisasi untuk membantu semua anggota organisasi tersebut. Bantuan yang diberikan sebagai tujuan akhir adalah agar semua anggota organisasi dapat melakukan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif. Audit internal membantu manajemen dalam mencari kemungkinan yang paling baik dalam hal penggunaan sumber modal secara efisien dan efektif. Semua bantuan audit internal dapat diberikan melalui analisis-analisis, penilaian, saran, bimbingan serta informasi tentang aktivitas yang diperiksa. Bagian internal audit ini merupakan bagian yang terkait dalam Satuan Pengawasan Intern perusahaan. Dasar hukum PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 66 ayat (1) dan (2) menjelaskan setiap BUMN wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Kepmen BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, Pasal 22 (1) yaitu Direksi harus menetapkan SPI yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

Tugas Satuan Pengawas Intern

Tugas SPI dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Di dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, berisi : (a) Pada setiap BUMN membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan

aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, (b) atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal (c) direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Adapun pengertian Satuan Pengawasan Intern menurut Undang-undang RI No.19 Tahun 2003 Pasal 67 menjelaskan bahwa : “ Satuan Pengawasan Intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama”. Disini kedudukan SPI menjadi penting dan harus independen tanpa terpengaruh dari pihak manapun. Peraturan yang mengatur tugas Satuan Pengawas Intern pada Undang-Undang BUMN Pasal 67 Satuan Pengawasan Intern bertugas: (a) Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya, (b) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksanaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama, (c) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Keterkaitan ISO Dengan Satuan Pengawas Intern (SPI)

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah menyebutkan bahwa salah satu tugas SPI adalah mengawasi internal perusahaan. Salah satu pedoman SPI mengawasi internal perusahaan dinilai berdasar prosedur mutu ISO. Fungsi SPI akan bermanfaat jika SPI mampu mengawasi kegiatan setiap unit perusahaan sesuai dengan prosedur mutu ISO. Setelah dilakukan evaluasi SPI juga akan memantau temuan yang disarankan telah dilaksanakan oleh unit terkait. Satuan Pengawas Intern yang

independen membantu manajemen mengevaluasi hasil kinerja unit perusahaan tanpa pengaruh dari pihak lain.

Penilaian Efektifitas Fungsi Satuan Pengawas Intern

Efektivitas merupakan ukuran dari output. Secara singkat efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya (IBK. Bayangkara, 2008:14). Berdasarkan buku Pedoman Penilaian Efektifitas Fungsi Satuan Pengawas Intern BUMN/BUMD terdapat sebelas indikator untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan audit internal dalam suatu organisasi, yaitu: (a) Independensi, (b) tugas, fungsi, tanggung jawab dan ruang lingkup, (c) rencana kerja, (d) pedoman pemeriksaan, (e) perkembangan SDM, (f) pengendalian mutu, (g) koordinasi dengan pemeriksa ekstern, (h) perencanaan pemeriksaan, (i) pelaksanaan pemeriksaan, (j) laporan hasil pemeriksaan, (k) tindak lanjut pemeriksaan.

Hasil akhir dari suatu audit intern adalah berupa laporan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang didalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Di samping itu laporan menjadi penting karena dapat dijadikan referensi berharga mengenai pekerjaan pemeriksaan untuk pemeriksaan selanjutnya di masa yang akan datang. Temuan audit yang disampaikan dengan baik dalam laporan audit internal akan memberitahukan manajemen mengenai kelemahan dalam pengendalian intern yang bila dibiarkan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan yang merugikan perusahaan. Selain itu rekomendasi yang disampaikan audit internal akan membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan perbaikan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan bisa diperkecil.

Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan yang dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Tujuan dari laporan audit adalah sebagai berikut: (a) Laporan auditor adalah merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan, (b) menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, (c) sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan (*review*) adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan audit internal. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya. Laporan audit akan efektif bila terdapat pelaksanaan tindak lanjut agar proses audit yang berjalan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan. Untuk itu departemen audit internal bertugas untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut, menganalisis kecukupan tindak lanjut disertai identifikasi hambatan pelaksanaannya, dan memberikan laporan atas tindak lanjut tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merujuk pada bidang penelitian institusional. Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lembaga. Hasil penelitian akan sangat berguna bagi pimpinan untuk pembuatan keputusan. Hasil penelitian lebih menekankan kepada validitas eksternal (kegunaan), variabel lengkap (kelengkapan informasi) dan kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan (Sugiono, 2007:7).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data hasil wawancara. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang diolah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan dan sistem prosedur mutu

ISO. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan *interview* (wawancara). Penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan tim ISO dan dokumentasi. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan menetapkan informan untuk memasuki obyek penelitian. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada tim ISO peneliti mencatat hasil wawancara. Dalam Teknik pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber dan dilakukan secara terus-menerus. Analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian saling dihubungkan dengan data lagi secara berulang sampai dengan disimpulkan berdasar fakta yang ada.

Aktivitas dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2005:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Data yang diperoleh akan dianalisis sebagai implementasi pelaksanaan dari sistem prosedur mutu

PEMBAHASAN

PT. XYZ merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang manufaktur. Fungsi pengawasan di PT. XYZ dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern. Sesuai prosedur mutu Audit Satuan Pengawas Intern (SPI) tujuan dari SPI adalah memberikan kontribusi kepada manajemen berupa jasa “*assurance*” dan “*consulting*” yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan, melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan proses *governance* dengan melaksanakan pemeriksaan

operasional dan pemeriksaan keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang BUMN Pasal 67 Satuan Pengawasan Intern. Namun perlu dilakukan kajian ulang tentang peningkatan efektivitas kegiatan operasional dalam obyek pemeriksaan proyek pemerintah. ISO menjadi acuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas operasional.

Prosedur Mutu Audit Satuan Pengawas Intern (SPI) mencantumkan tujuan SPI PT. XYZ yaitu memastikan pengelolaan perusahaan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan dan peraturan lainnya yang berlaku. Ruang lingkup SPI PT. XYZ meliputi kegiatan operasional dan keuangan perusahaan.

Pelaksanaan audit SPI PT. XYZ menjadi tanggung jawab Direktur Utama berserta tindak lanjut disposisinya, hal ini dibuktikan dengan adanya Memo kepada Direktur Utama tentang disampaikannya LHP Unit Pemasaran Proyek Pemerintah dan Lembaran Disposisi Direktur Utama. Prosedur mutu disebutkan bahwa Tanggung jawab Pimpinan Fungsi Khusus yang berhubungan dengan Pengawasan Intern bertanggung jawab terhadap pengendalian pengawasan bidang operasional dan keuangan perusahaan serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dimaksud Pimpinan Fungsi Khusus yang berhubungan dengan Pengawasan Intern adalah Manajer SPI PT. XYZ. Dalam pengawasan bidang operasional dan LHP Unit Pemasaran Proyek Pemerintah yang bertanggung jawab adalah Manajer SPI PT. XYZ. Sebagai pimpinan unit kerja obyek yang diperiksa Manajer Unit Pemasaran Proyek Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak lanjuti LHP Unit Pemasaran Proyek Pemerintah.

Kegiatan sistem mutu dengan 2 ketentuan pokok telah dilaksanakan SPI PT. XYZ yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan operasional serta menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No: 12 tahun 1998 pada Unit Pemasaran Proyek

Pemerintah. Manajer SPI PT. XYZ dibantu Kepala Pengawas Bidang bersama Pemeriksa melaksanakan tugasnya pada Unit Pemasaran Proyek Pemerintah sesuai ketentuan Sistem Manajemen Mutu.

Pelaksanaan Audit Internal oleh SPI

Program Pengawasan

Manajer SPI PT. XYZ melakukan pengawasan atau melakukan pemeriksaan menyusun program kerja telah menyusun program yaitu: (a) Program Kerja Pengawasan Tahunan / PKPT. Contoh SPI pada pengawasan Unit Pemasaran Proyek Pemerintah sasaran pemeriksaannya evaluasi terhadap pengelolaan Unit Pemasaran Proyek Pemerintah dengan tenaga pemeriksa 3 orang, hari pemeriksaan 30, hari pemeriksa 90 (b) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilihat dari objek yang diperiksa yaitu Unit Pemasaran Proyek Pemerintah dan, (c) PKPT dilihat dari segi pemeriksa sudah disusun dengan 10 objek pemeriksa. Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Unit Pemasaran Proyek Pemerintah tenaga pemeriksa yang digunakan sebanyak 2 orang yaitu ketua tim pemeriksa dan 1 anggota pemeriksa dari SPI. Program pengawasan telah dilaksanakan sesuai prosedur oleh SPI dalam PKPT.

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

Persiapan pelaksanaan pengawas SPI dengan memeriksa objek pemeriksaan Obyek Unit Pemasaran Proyek Pemerintah dengan kegiatan awal: (a) pemberitahuan pemeriksaan ke objek dan unit ditujukan sesuai dengan PP No. 12 tahun 1998 pasal 28 s/d 30 kepada manajer Unit Pemasaran Proyek Pemerintah, (b) penunjukan pemeriksa terdiri dari ketua dan anggota tim pemeriksa yang ditugaskan oleh Manajer SPI PT. XYZ, (c) penyusunan *Internal Control Questioner* (ICQ) oleh tim pemeriksa mencakup SPM elemen: struktur organisasi, kebijakan/peraturan/otorisasi, prosedur/metode kerja/pencatatan, SDM, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, perbaikan/tindak lanjut. *Internal Control Questioner*

(ICQ) digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan fungsi penilaian kinerja yang ada dalam Unit Pemasaran Proyek Pemerintah.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Unit Pemasaran Proyek Pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan Tim ISO, Tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dari persiapan bahan, *survey* dan wawancara dengan manajer Unit Pemasaran Proyek Pemerintah serta pemeriksaan lanjutan yang pada akhirnya menyusun Laporan Temuan Pemeriksaan (LTP). Ditemukan 2 bidang dan judul temuan dari hasil pemeriksaan pada Unit Pemasaran Proyek Pemerintah yaitu: (1) tinjauan kontrak sebaiknya dilakukan sesuai Standar yang ada di Sisdur ISO dan (2) pemantauan dan evaluasi suatu proyek sebelum kontrak s/d delivery perlu dilakukan secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan judul temuan no. (1) tinjauan kontrak sebaiknya dilakukan sesuai Standar yang ada di Sisdur ISO sebagai bahan evaluasi. Kondisi yang terjadi dari hasil pemeriksaan terhadap notulen tinjauan kontrak ditemukan ada 5 tinjauan kontrak yaitu Notulen Tinjauan Kontrak yang seluruhnya antara lain menyebutkan “Nota Dinas Segera diterbitkan” dan seluruhnya belum ada pengesahan dari Direktur Komersial. Atas notulen tersebut diatas dijadikan dasar penerbitan Nota Dinas yang diterbitkan Kesepakatan bahwa “Nota Dinas Segera diterbitkan” ini belum diatur dalam Prosedur Mutu perusahaan. Disamping itu penerbitan Nota Dinas adalah kewenangan Direksi, apabila dipandang perlu Tinjauan Kontrak sebatas pada mengusulkan kepada Direksi.

Kriteria sesuai Prosedur Mutu tentang proses yang terkait dengan Pelanggan dijelaskan: Fungsi Komersial yang berhubungan dengan *sales* melaksanakan Tinjauan Kontrak untuk memastikan kelengkapan serta pemahaman kebutuhan dan harapan atau persyaratan pelanggan/ calon pelanggan. Kedua disebutkan: Hasil tinjauan kontrak disahkan oleh Direktur Fungsi Komersial. Pemahaman terhadap prosedur Mutu belum sepenuhnya dan kekurangan kepedulian personil terhadap ketertiban administrasi otorisasi

tinjauan kontrak. Akibatnya terjadi keputusan di Tinjauan Kontrak yang secara lingkup di luar kewenangan forum Tinjauan Kontrak (belum diatur sistem), legalitas tinjauan kontrak sebagai dasar penerbitan Nota Dinas belum didukung dengan landasan sisdur atau kebijakan tertulis serta 5 Notulen tinjauan kontrak yang dibuat pemasaran belum sesuai prosedur.

Rekomendasi : Fungsi pemasaran melaksanakan Tinjauan Kontrak sesuai prosedur mutu, mereview dan mengusulkan perbaikan ke MR bilamana prosedur Mutu dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan (misalnya, ditambahkan kegiatan untuk mengusulkan Nota Dinas), segera dimintakan pengesahan Notulen Tinjauan kontrak ke Direktur Komersial.

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Unit Pemasaran Proyek Pemerintah.

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Unit Pemasaran Proyek Pemerintah diawali dengan tanggapan Unit Pemasaran Proyek Pemerintah dari hasil LTP SPI ditujukan untuk manajer SPI. Dari ketentuan prosedur mutu SPI memberikan batas waktu paling lambat dua minggu sehingga manajer SPI tidak perlu memberikan surat teguran. Berdasarkan LTP yang sudah ditanggapi oleh Unit Pemasaran Proyek Pemerintah maka tim pemeriksa meminta pengesahan dari manajer SPI agar pengawasan intern dapat segera dilaksanakan.

Hasil ringkasan Temuan Pemeriksaan

Hasil ringkasan temuan pemeriksaan periode pemeriksaan disebutkan tinjauan kontrak sebaiknya dilakukan sesuai standar yang ada di prosedur mutu. Prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan fungsi Pemasaran adalah Sistem Akuntansi Penjualan dan Sistem Manajemen Mutu mengatur tentang proses yang terkait dengan pelanggan (persyaratan calon pelanggan, tinjauan kontrak, produk dll). Struktur Organisasi

perusahaan telah berkembang dan terdapat fungsi yang menangani fungsi pengembangan bisnis, secara sistem s/d saat audit belum ada aturan yang mengatur keterkaitan antara fungsi Pemasaran dengan fungsi Pengembangan bisnis internal perusahaan bisa berjalan secara optimum maka perlu disusun sistem yang mengatur keterkaitan antara fungsi tersebut. Ketertiban pencatatan perkembangan proyek perlu dilakukan secara tertib (tepat waktu) di buku pelanggan, catatan-catatan tersebut digunakan sebagai salah satu bahan untuk evaluasi secara periodik atas perkembangan proyek yang ditangani. Evaluasi dilakukan bersama fungsi terkait supaya menghasilkan hasil evaluasi yang akurat dan memudahkan manajemen mengambil keputusan.

Tindak Lanjut LHP

Manajer SPI telah mengajukan LHP kepada Direktur Utama untuk didisposisi. Dalam laporan tindak lanjut LHP dengan temuan hasil pemeriksaan yaitu tinjauan kontrak sebaiknya dilakukan sesuai standar yang ada di Sistem ISO telah disposisi oleh Direktur Utama. Disposisi Dirut atas temuan hasil pemeriksaan di Unit Pemasaran Proyek Pemerintah adalah agar ditindaklanjuti dengan penyempurnaan prosedur. Keterangan tersebut masih bersifat umum tidak jelas siapa dan apakah yang harus ditindak lanjuti dari temuan hasil pemeriksaan. Perlu dilakukan kajian mendalam tentang fungsi dari SPI di PT. XYZ, tidak adanya komunikasi yang baik antara Dirut dan bagian SPI sehingga terjadi ketidakjelasan antara laporan yang diberikan oleh SPI kepada Dirut. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa disposisi yang diajukan Manajer SPI kepada Direktur Utama ditangani setelah beberapa lama hingga pihak SPI berinisiatif sendiri untuk mengajukan kembali disposisi terhadap LHP. Tidak diketahui penyebab keterlambatan itu. Tindak lanjut LHP dilakukan oleh Unit Pemasaran Pemerintah sesuai perintah Direktur Utama. Tim pemeriksa memonitoring terhadap tindak lanjut secara periodik. Monitoring pertama dilakukan satu bulan setelah Disposisi Dirut diterima dan telah direalisasikan.

Dari penjelasan tentang pelaksanaan pemeriksaan SPI PT. XYZ terhadap Unit Pemasaran Pemerintah, pihak SPI PT. XYZ telah melakukan fungsi sesuai dengan prosedur mutu ISO 9001. Semua tahap pemeriksaan telah dilaksanakan dan berperan aktif dalam evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen operasional pada Unit Pemasaran Pemerintah.

Peran SPI dalam mengawasi kinerja Unit Pemasaran Proyek Pemerintah

Dari tujuan SPI PT. XYZ yang memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dijalankan oleh sesuai ketentuan yang ditetapkan sudah dilaksanakan. Hal ini dilihat dari SPI PT. XYZ telah melaksanakan kegiatan pengelolaan terhadap Unit Pemasaran Proyek Pemerintah sesuai dengan prosedur mutu ISO 9001. Namun jika dibandingkan dengan Peraturan yang mengatur tugas Satuan Pengawas Intern pada Undang-Undang BUMN Pasal 67 poin (a) tentang tugas Satuan Pengawasan Intern yaitu : Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya, tujuan dari SPI PT. XYZ pada prosedur mutu ISO 9001 belum sepenuhnya dicantumkan sesuai Undang-Undang BUMN Pasal 67 poin (a). Kemudian prosedur mutu menerbitkan tujuan audit Satuan Pengawas Intern (SPI) disempurnakan menjadi: Memberikan kontribusi kepada manajemen berupa jasa “*assurance*” dan “*consulting*” yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas kegiatan operasional perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengenalan intern dan proses *governance* dengan melaksanakan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan keuangan perusahaan. Prosedur mutu menyebutkan ruang lingkup SPI PT. XYZ adalah kegiatan operasional dan keuangan perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan pada Unit Pemasaran Proyek Pemerintah merupakan pemeriksaan kegiatan operasional perusahaan.

Fungsi SPI Dalam Menunjang Efektivitas Unit Pemasaran Pemerintah

Satuan Pengawas Intern memiliki kedudukan yang independen terhadap bagian yang diperiksa sehingga memberikan penilaian yang obyektif, bertanggung jawab secara langsung kepada Direktr Utama. Satuan Pengawas Intern memiliki kedudukan independen terhadap bagian yang diperiksa, hal ini dapat dilihat dari tugas SPI yang bertugas sebagai pengawas saja sesuai program kerja audit yang diberikan. Satuan Pengawas Intern melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan unit Pemasaran Proyek Pemerintah dan memastikan apakah unit Pemasaran Proyek Pemerintah telah menjalankan sisdur ISO. Berdasar pemeriksaan tersebut SPI membuat laporan yang ditujukan pada direksi yang berisikan temuan-temuan selama pemeriksaan disertai dengan rekomendasi perbaikan yang diusulkan kepada manajemen dalam mengambil keputusan guna kemajuan perusahaan.

Efektivitas fungsi pemasaran dapat ditingkatkan melalui audit operasional. Dengan adanya SPI diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk lebih meningkatkan kegiatan operasional unit Pemasaran Proyek Pemerintah. Dari hasil audit SPI ternyata masih ditemukan kegiatan yang belum berdasarkan ISO 9001. Setelah dilakukan audit ditemukan kelemahan belum ada realisasi kontrak penjualan sehingga memerlukan upaya yang lebih keras untuk mendapatkan kontrak. Untuk itu SPI memberikan rekomendasi supaya fungsi pemasaran melaksanakan tinjauan kontrak sesuai prosedur mutu, mereview dan mengusulkan perbaikan ke MR bilamana prosedur Mutu dipandang tidak mampu memenuhi kebutuhan (misalnya, ditambahkan kegiatan untuk mengusulkan Nota Dinas), segera dimintakan pengesahan Notulen Tinjauan kontrak ke Direktorat Komersial. Pihak unit Pemasaran Proyek Pemerintah mengusulkan Nota Dinas. Hal ini juga terjadi pada unit Pemasaran Proyek Swasta dan Ekspor yang berada pada kesatuan unit Pemasaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Manajer Unit Pemasaran Proyek Pemerintah terbantu dengan keberadaan SPI. Tanggapan Temuan Pemeriksaan SPI tentang tinjauan kontrak pihak Unit Pemasaran Proyek Pemerintah digunakan sebagai dasar/ masukan dari hasil pemeriksaan SPI yang dinilai perlu diperbaiki. Saran dari SPI digunakan untuk meningkatkan hasil kinerja pada Unit Pemasaran Proyek Pemerintah pada kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu kegiatan mengawasi pelaksanaan prosedur ISO dilaksanakan oleh SPI PT. XYZ kali ini telah menunjukkan perannya sebagai peningkat keefektifan audit operasional dalam unit Pemasaran Proyek Pemerintah.

KESIMPULAN

Satuan pengawasan intern (SPI) telah melaksanakan audit internal berdasarkan prosedur mutu SPI secara berurutan. Pelaksanaan audit internal diawali dengan program pengawasan, pelaksanaan persiapan pengawasan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Unit Pemasaran Proyek Pemerintah, hasil ringkasan dan temuan tindak lanjut. Dari pelaksanaan audit internal ditemukan disebutkan tinjauan kontrak sebaiknya dilakukan sesuai standar yang ada di prosedur mutu. Prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan fungsi pemasaran adalah Sistem Akuntansi Penjualan dan Sistem Manajemen Mutu mengatur tentang proses yang terkait dengan pelanggan. Fungsi SPI dalam menjalankan audit internal dapat dikatakan efektif dan efisien. Tujuan dari SPI supaya semua anggota organisasi dapat melakukan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepadanya secara efektif telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang menunjukan bahwa dengan adanya SPI yang melakukan pengawasan kegiatan operasional dijalankan sesuai dengan ISO 9001. Saran perbaiki untuk unit yang diperiksa berguna supaya kekurangan yang terjadi tidak terulang di masa yang akan datang. SPI mempunyai kedudukan yang independen terhadap bagian-bagian yang

diperiksanya. Hal ini dilihat pengawas dengan tidak terlibatnya SPI terhadap salah satu fungsi yang ada pada PT. XYZ.

SARAN

Fungsi pemasaran dihimbsu melaksanakan tinjauan kontrak sesuai prosedur mutu. Pemahaman dari prosedur mutu oleh karyawan perlu ditingkatkan supaya kegiatan unit pemasaran sesuai prosedur mutu. Pemahaman tidak hanya pada objek yang diteliti namun pada pemeriksa yang kompeten dengan ISO 9001:2008 yang harus selalu ditingkatkan agar mampu untuk merencanakan audit internal dengan baik dan dapat memenuhi semua unsur standar diaudit oleh auditor yang ditunjuk. Kerjasama dari semua lapisan unit sangat membantu terwujudnya peran SPI dalam melaksanakan audit internal yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens dan Loebbecke. 2006. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Avianti, Ilya. Pentingnya Penguatan Peran Satuan Pengawasan Intern Dalam Menciptakan Value Bagi Perusahaan, Musyawarah Nasional X dan Seminar Nasional Internal Audit 2010 dengan tema “*Peran Internal Audit dalam menghadapi ACFTA*” Bandung, 22 April 2010.
- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bu, Kwang. 2006. Peranan Internal Audit Dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian Pada PT.XYZ. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* , Volume. 6, No. 2, hal. 118-122.
- Djanegara, Moermahadi Soerja, Triandi, dan Skundita Pratikno. 2009. Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Fungsi Pembelian Pada PT.Organ Jaya. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Volume. 9, No. 1, hal. 1-8.
- Iriyadi. 2004. Evaluasi Atas Prosedur Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan. Ranggagading. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* , Volume. 4, no. 1, hal. 75-96.
- Keputusan Menteri BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3 Cetakan 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, 2002. *Sistem Akuntansi*. Edisi 6 Cetakan 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Pasaribu, Hiras. Pengaruh Profesionalisme Satuan Pengawas Intern Dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Keefektifian Pengendalian Anggaran: Suatu Studi Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. , Edisi Agustus 2001, no. 188, hal. 27-39.
- Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN
- Pratama, Calista, 2012 *Audit; Audit Manajemen; Sistem Pengendalian Intern; Sumber Daya Manusia; Audit Manajemen Atas Sumber Daya Manusia; Konsep Penilaian Kinerja Karyawan*, viewed 4 Juli 2012, <<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=166147>>.

- Ritonga, Muhammad Zilal Hamzah Musa. 2006. Pengaruh Satuan Pengawasan Intern (SPI) Terhadap Upaya Peningkatan Kinerja PD. Perkebunan Propinsi Sumatra Utara', *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesian Business School*, <<http://www.gunadarma.ac.id>>
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tugiman. Hiro. 1997, *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Wulandari, Sari 2011, *Peranan dan Kedudukan Auditor Internal dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern pada PT Indosat Tbk Medan*, dilihat 10 Juli 2012, media release, <<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29687>>